BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya dunia saat ini, banyak perusahaan yang tidak luput dari bagian logistik untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan koefisien serta keefektifan SOP *(Standart Operating Procedure)* dalam memulai melakukan pemesanan, penyimpanan dan pendistribusian barang baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Kegiatan logistik memerlukan adanya beberapa serangkaian proses diantaranya yaitu : Proses Pengadaan Barang *(procurement)*, Kegiatan Produksi *(manufacturing support)*, Distribusi *(physical distribution)*.

Menurut (*Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah*, 2012) Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008 menyatakan bahwa pengertian dari *Standard Operasional Prosedure* adalah :

a. Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai adanya berbagai proses peneyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa akan dilakukan;

b. Standar Operasioanal Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) adalah standar operasioanal prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Administrasi pemerintah adalah pengelolaaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah;

d. SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan;

e. SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan

(*Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah*, 2012) Tujuan diadakannya Standar Operasional Prosedur adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah :

a. Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing;
b. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintah;
c. Ketertiban dalam penyelenggara pemerintahan;
d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada umumnya Standar Operasional Prosedur menurut (Atmoko, 2012) digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Tujuan SOP adalah untuk menciptakan komitmen yang mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja dari instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

(*Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah*, 2012) Organisasi merupakan suatu jaringan tata kelola, tata kerja yang dilakukan bersama dengan kelompok orang-orang secara teratur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan diawal yang didalamnya terdapat tatanan kerja sama dan hubungan antara atasan dan bawahan yang saling keterkaitan. Penentuan Standar Operasional Prosedur dalam proses pengadaan

sampai pendistribusian barang tersebut yang baik dan benar merupakan komponen yang sangat penting karena hal tersebut untuk menghindari terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi dan tentunya juga akan berpengaruh dalam total-total seperti total biaya transportasi, waktu operasi, dan total biaya lain yang diperlukan dalam manajemen logistik.

Kecurangan atau yang biasa disebut *fraud* sampai pada saat ini kecurangan merupakan salah satu hal yang sangat fenomenal baik di negara berkembang maupun di negara maju, kecurangan merupakan salah satu penipuan, tindakan yang menyimpang dan melanggar yang dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan tersebut dan memberikan keuntungan bagi para pelaku kecurangan. Semua organisasi baik dari segi jenis, bentuk, dan skala operasi dan kegiatannya memiliki berbagai resiko diantaranya terjadi kecurangan atau *fraud*. Kecurangan dalam sebuah organisasi dapat menimbulkan banyak kerugian seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, rusaknya moril karyawan dan bahkan sampai kerugian keuangan negara.

Sepanjang sejarah, kasus kecurangan yang terjadi telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan mempengaruhi pemegang saham pada banyak organisasi. (Kanagaki, 2017) mendefinisikan kecurangan bahwa setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan adanya penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tidakaan-tindakan ini bergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dapat dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan apa saja yang dia inginkan seperti uang, properti atau

layanan guna untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2017) yang merupakan organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia dan organisasi penyedia utama pendidikan dan pelatihan mengenai anti-*fraud* mendefinisikan kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan aturan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu (seperti manipulasi atau memberikan laporan yang salah) dilakukan orang-orang yang dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain(Siregar, 2017).

The ACFE *(Association of Certified Fraud Examiner)* (Albrecht W. Steve, dkk, 2008) membagi *Fraud* (kecurangan) dalam jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu :

1. Penyimpangan atas aset *(Asset Misappopriation)*;

Penyimpangan ini meliputi dari penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta milik perusahaan atau pihak lain dan hal ini merupakan bentuk *fraud* yang sangat mudah untuk dilakukan pendeteksian karena sifatnya yang *tangible* atau dapat dihitung secara langsung.

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan *(Fraudulent Statement);*

Pernyataan palsu atau salah pernyataan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi, dengan melakukan perekayasaan laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang

diinginkan. Penggelapan aset perusahaan yang dilakukan dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Korupsi *(Corruption).*

Jenis *fraud* ini paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerja sama dngan pihak lain seperti pada kasus suap dan korupsi. Akan tetapi di dalam pengkajian yang lebih mendalam, hal ni terjadi karena adanya kerjasama yang merugikan pula, yang dimana di dalamnya termasuk penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah dan pemerasan yang dilakukan secara ekonomi.

Penelitian ini menggunakan Teori *Fraud diamond* yang merupakan suatu bentuk pembaharuan dari teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1950). Selain elemen tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi, Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud yakni kemampuan (*capability*) sehingga menjadi empat elemen yang dikenal dengan *Fraud Diamond*. *Capability* adalah sifat dari individu yang melakukan penipuan atau *fraud*, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya untuk melakukan kecurangan. Pada penelitian ini, sebagaimana di gambarkan berikut ini:

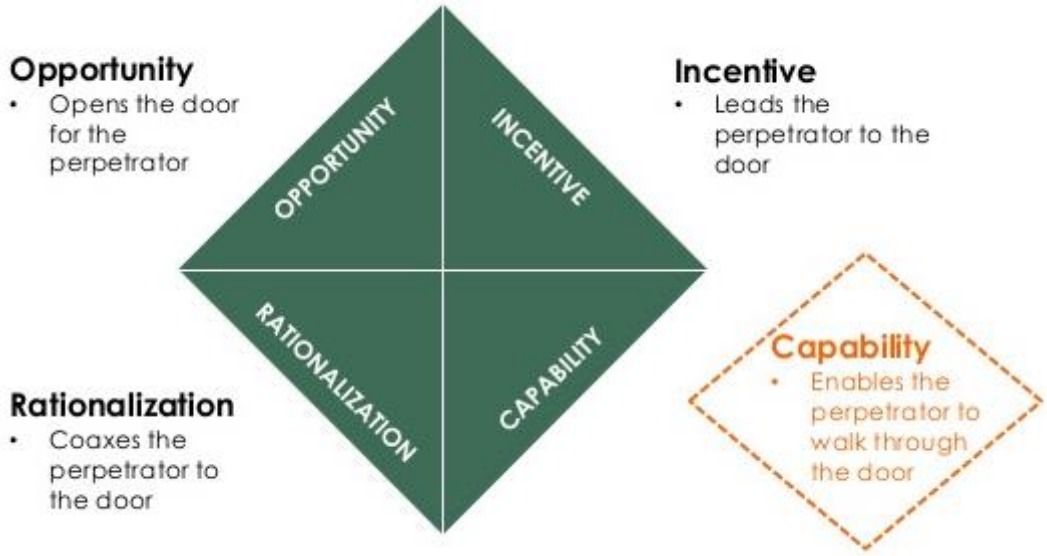

Gambar 1. 1 Fraud Diamond

Menurut (Ristaningsih, 2017) komponen – komponen yang terdapat di *Fraud Diamond* diantaranya yaitu :

1. Tekanan (*pressure)*

Tekanan adalah sesuatu tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat dipicu oleh tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangannya, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem yang ada dan ketidakpuasan dalam bekerja.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan para pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang sebagian besar disebabkan oleh adanya pengendalian internal yang lemah, ketidakdisplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit dan adanya sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak

baik akan memberi peluang bagi seseorang maupun kelompok sebagian untuk melakukan kecurangan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi menjadi salah satu elemen dalam terjadinya *fraud*, dimana para selalu mencari pembenaran atas perbuatan yang telah ia lakukan dengan kata lain memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima, bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan adalah sebuah imbalan yang pantas untuk dirinya. Sikap atau karakter yang dimiliki pelaku akan menentukan rasionalisasi atas pembenaran kecurangan yang dilakukannya, contohnya bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi atau melakukan pembenaran terhadap penipuan tersebut penipuan.

4. Kemampuan *(Capability)*

Namun ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yakni *Individual capability*. *Individual capability* adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini mengangkat sebuah Fenomena yang terjadi pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuankota dan Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002

laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali *(reasted)*, karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitan dua buah daftar harga persediaan *(master prices)* pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalaha dengan dlakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakkan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi (Parsaroan, 2009).

Tidak hanya itu fenomena yang diangkat juga dari PT Semen Indonesia Logistik bermula dari salah satu karyawan bidang pemasaran yang terbukti melakukan penggelapan bahan bangunan dan penjualan fiktif, dengan rekannya pemilik toko bangunan yang menyebabkan kerugian perusahaan mencapai Rp 1,8 M lebih akibat adanya penggelapan dan penjualan fiktif tersebut dan perusahaan juga mengalami penurunan laba yang cukup signifikan hingga tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk memberikan CSR bagi lingkungan sekitarnya (Ramadhan, 2018).

Penelitian ini difokuskan pada proses untuk memahami, menganalisis upaya-upaya dalam tindakan kecurangan dan mencegah untuk terjadinya kecurangan. Kecurangan tidak hanya terjadi di bidang pemesanan dan penjualan

saja. Bisa saja terjadi di bidang lainnya, seperti di bidang Logistik atau pengadaan barang yang terjadi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Terdapat kejanggalan pelaksanaan di lapangan berupa pemberian *tip* untuk mempermudah dalam pengambilan barang. Hasil ini diketahui berdasarkan wawancara awal yang di lakukan dengan Manajer Logistik (Lampiran 1). Analisis kecurangan logistik yang dideteksi nantinya menggunakan *fraud diamond*. Variabel yang digunakan antara lain tekanan (*pressure),* kesempatan *(opportunity),* rasionalisasi *(rationalization),* dan kemampuan (*capability).*

Topik penelitian tentang *Fraud Diamond* dipilih karena adanya fenomena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (Lampiran I). Subjek penelitian ini dipilih karena terdapat kejanggalan yang terjadi di gudang PDAM, dalam pelaksanaan penemrimaan dan pengeluaran barang. Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS FRAUD DIAMOND UNTUK MENDETEKSI INDIKASI KETIDAKSESUAIAN PROSEDUR DI PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diberikan pada latar belakang masalah maka penelitian ini akan membahas mengenai analisis *Fraud* Diamond untuk mendeteksi kecurangan logistik dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tingkat kedisiplinan SOP terhadap *Fraud Diamond* ?

2. Hal apa saja upaya-upaya yang menjadikan SOP kurang memadai ?
3. Hal apa saja yang menjadi peluang kemungkinan terjadinya ketidaktaatan terhadap SOP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi perumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tingkat kedisiplinan SOP terhadap *Fraud Diamond.*
2. Untuk mengetahui hal apa saja upaya-upaya yang menjadikan SOP kurang memadai.
3. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi kemunkinan terjadinya ketidaktaatan SOP.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat bagi :

1. Bagi Praktisi

   Untuk meninjau kembali dan memahami lagi mengenai pengaruh pelaksanaan tingkat kedisiplinan SOP di bagian logistik. Diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat mengetahui bagaimana tingkat kedisiplinan SOP terhadap *Fraud Diamond*.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan para peneliti ini mampu memberikan pandangan kepada pihak manajemen sebagai *agent* terkait tanggungjawabnya dalam melindungi kepentingan dalam hal persediaan. Manajemen diharapkan lebih mengetahui dampak jangka panjang apabila kuranganya tingkat kedisiplinan SOP.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu penelitian dalam mempertimbangkan penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa dan instansi yang terkait.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, pengulasan penelitian-penelitian terdahulu dengan mengidentifikasi hasil penelitian serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, memaparkan teori yang menjadi landasan bagi penulis dan bagaimana kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITAN

Membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sampel data dan sumber data, variable penelitian, teknis analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek yang diteliti, kemudian menganalisis dan menjelaskan dari data-data yang diperoleh melalui observasi da wawancara pada pihak informan yang terkait.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, saran yang merupakan implikasi penelitian baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya bagi peneliti selanjutnya.